

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur :

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung. 2013.
- Asshidiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Konstitusi Press. Jakarta. 2005.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana I : Stelsel Pidana Tindak Pidana. Teori-Teori Pidana dan Batas berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Denny Indrayana. *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Total Media. Yogyakarta. 2012.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Djaja, Ermansyah. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Gumilang. *Kimialistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. angkasa. Bandung. 1991
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajagrafindo Persada. Depok. 2012.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2008.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, September, 2000.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Hiariej, Eddy. *Teori dan Hukum Pembukian*. Erlangga Jakarta. 2012
- Jhony, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

Bayu Media Publishing. Malang. 2010.

Kristanto, Aditya Heri. *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.1. No.15. 2014.

Kristina, Yudi. *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006.

_____, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Thafamedia. Jakarta. 2016.

_____, *Teknik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Thafa Media. Yogyakarta. 2018

Mahfud, Mohammad. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Pustaka LP3ES. Jakarta. 2007.

_____, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoretis, Praktek dan Permasalahannya*. Alumni. Bandung. 2007.

_____, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung. 2007.

_____, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*. PT Alumni. Bandung. 2007.

Nirwanto, Andhi. *Terminologi Tindak Pidana Korupsi*. Aneka Ilmu. Semarang. 2013.

Nugroho, Hibnu. *Intgralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Media Prima Aksara. Jakarta. 2012.

Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Bandung. 2002.

Rosnawati, Emy *Praktek Peradilan Pidana*. UMSIDA Press. Sidoarjo. 2019.

R. Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Politea. Bogor. 1980.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.

_____, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1981.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 2005.

Sudjana, Eggi. *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*. JP.Books. Surabaya. 2008.

Sunggu, Tumbur Ompu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2012.

Supeno, Hadi. *Korupsi di Daerah; Kesaksian. Pengalaman dan Pengakuan*. Total Media. Yogyakarta. 2009.

Surachim dan Suhandi Cahaya. *Strategi dan Teknik Korupsi (Mengetahui untuk Mencegah)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.

Wiyono, *Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.

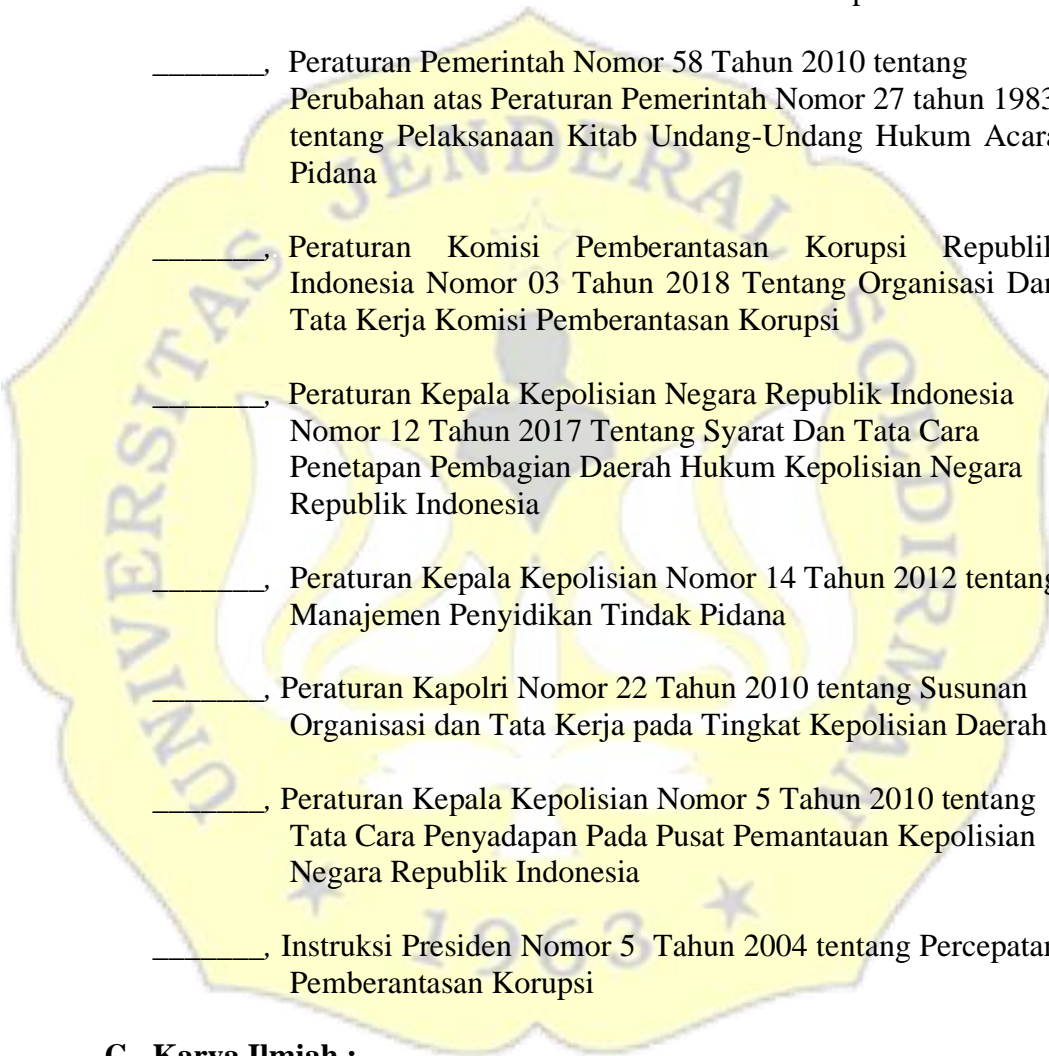
B. Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 (KUHP)

_____, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

_____, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 
- _____, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - _____, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - _____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - _____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - _____, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi
 - _____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - _____, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
 - _____, Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah
 - _____, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - _____, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

C. Karya Ilmiah :

- AH, Usman. Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 30. No. 1, Desember, 2015.
- Hertanto, Hasil. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *MaPPI FHUI*. Vol.1. No. 1, 2018.

Hussein, Febry Satya Wibawa. Tinjauan Sejarah Dinamika KPK di Indonesia pada Periode I dan II. *Jurnal Edukasi*. Vol. 2. No. 1. Maret 2020.

Nugroho, Hibnu. Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.13. No.3. 2013.

Ridwan. Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*. Vol.1. No.1. Juni 2020.

Rumaygit, Noveydi. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8. No. 2, Juni,2020.

Siahaan, Herikson Parulian. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Piana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. Vol.1.No.2, 2019.

Sianipar, Efektivitas Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Punlik di Batam, *Journal of Judicial Review*, Vol. 21, No. 2,Desember 2019.

Sukri, Nandi Japri. Penyardapan Oleh KPK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. *Journal Lex Privatum*. Vol.5. No.8. Oktober 2017.

Sugiyanto. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal STIA ASMI*. Vol.2. No.1, 2020.

Usman, Sabian. Dasar-Dasar Soziologi. Yogyakarta. *Jurnal Pustaka Belajar*, 209.

D. Internet

KPK, Visi dan Misi KPK, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 23.54, dari https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/roadmap_kpk/92-tentang-kpk/visi-dan-misi